

IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN-SIMPAN PINJAM HARAPAN BERSAMA

Andrico Septian, Zaili Rusli dan Harapan Tua R.F.S

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Implementation of the Economic Business Program of the Savings and Loans Harapan Bersama Village. This research is a qualitative type. The research informant was the chairperson of UEK-SP and his staff Lurah, Chair of LPM and Women Leaders. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysts use interactive models ranging from data presentation, data reduction and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of UEK-SP in Kampung Melayu Village has not fully touched the community, the high arrears of loans by the community, namely the lack of awareness of the public to pay its debts, and the lack of optimal guidance and supervision activities.

Keywords: implementation, savings and loan program, communication, bureaucratic structure

Abstrak: Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam Harapan Bersama. Penelitian ini adalah jenis kualitatif. Informan penelitian adalah ketua UEK-SP dan stafnya Lurah, Ketua LPM dan Tokoh Wanita. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif mulai dari penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi UEK-SP di Kelurahan Kampung Melayu belum sepenuhnya menyentuh masyarakat, tingginya tunggakan pinjaman oleh masyarakat yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar hutangnya, serta belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Kata kunci: implementasi, program simpan pinjam, komunikasi, struktur birokrasi

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru secara geografis tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki potensi besar yang dapat diunggulkan, terutama di bidang jasa, industri rumah tangga, perdagangan, dan seni budaya, yang perlu digiatkan pembinaan dan pengembangannya. Salah satu jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Lurah sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat di sektor usaha ekonomi kreatif.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Dalam perkembangan industri kreatif di Kota Pekanbaru juga sedang mengalami sorotan mata masyarakat, terlihat dari beberapa bagian in-

dustri kreatif dapat ditemukan di Kota Pekanbaru, walaupun tidak semuanya.

Salah satu program Kelurahan Kampung Melayu dalam mengembangkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru adalah melalui Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP).

Kelurahan Kampung Melayu adalah salah satu Kelurahan yang terpilih menjalankan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dijalankan dalam bentuk pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan (DUD/K) yaitu melalui Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Harapan Bersama. Untuk menjadi pemanfaat Dana di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru melalui musyawarah di tingkat Kelurahan

menetapkan persyaratan utama yaitu masyarakat Kelurahan Kampung Melayu yang berdomisili minimal 5 tahun di Kelurahan Simpan Baru. Adapun kegiatan yang dijalankan dalam Program UEK-SP Harapan Bersama yaitu:

1. Kredit Modal Kerja yaitu berupa pinjaman/kredit yang diberikan kepada masyarakat menengah kebawah yang memiliki atau akan memiliki usaha ekonomi produktif guna menunjang ketersediaan dana bagi pengembangan usahanya.
2. Kredit Mikro
3. Program Pembinaan
4. Dana Bantuan Sosial

Berdasarkan tinjauan peneliti dilapangan, penulis mendapatkan bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan dalam Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru diantaranya:

1. Program UEK-SP Harapan Bersama belum seutuhnya dapat menyentuh masyarakat yang berekonomi lemah, karena masih banyak ditemukan Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi kelas menengah keatas dengan usaha yang sudah maju.
2. Masih banyak masyarakat yang terkendala dalam mengembalikan pinjaman dikarenakan usaha yang dikelola masih banyak yang belum berkembang yang berakibat pada penunggakan.
3. Program pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh pegawai UEK-SP Harapan Bersama untuk mengontrol dan membina masyarakat dalam mengelola usahanya belum berjalan optimal.
4. Banyaknya fasilitas yang kurang baik/memadai yang dimiliki Kantor UEK-SP Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi.

Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan penelitiannya adalah bagaimana implementasi program usaha ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi?

Thomas R Dye mengenai kebijakan public, yaitu “...is what government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program...” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan proram-program pemerintah...).

Kebijakan Publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya adanya komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari amana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (**Wibawa,dkk.,1994**).

Menurut Hogwood dan Gunn (**Wahab, 1997**), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana
- b. Tersedia waktu dan sumber daya
- c. Keterpaduan sumberdaya yang diperlukan
- d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung
- f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan
- g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan secara sistematis
- h. Komunikasi dan koordinasi yang baik
- i. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut **George C Edward III dalam Subarsono (2005)** memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni 1. Komunikasi 2.

sumberdaya 3. diposisi (sikap), 4. Struktur birokrasi dan keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Riant Nugroho (2005:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada didomain lembaga administrasi publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam kelurahan kampung melayu kecamatan sukajadi.

METODE

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah Lurah, Ketua LPM, Tokoh Wanita, Ketua UEK-SP, Kasir Tata Usaha KPM, Analisis Kredit. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif mulai dari penyajian, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi agar nantinya program UEK-SP Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ini dapat disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat yang tergolong fakir miskin yang dimaksudkan disini adalah kelancaran, kejelasan, dan konsistensi menyampaikan atau pengiriman perintah dan arahan atau informasi.

a. Transmisi

Sasaran program UEK-SP adalah anggota dan masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif. Dalam hal ini pelaksanaan program UEK-SP di Kampung Melayu menuntut informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga

kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait di masyarakat.

b. Kejelasan

Hal ini penting, agar para implementor dapat mengetahui dengan jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai implementasi kebijakan/program dan juga mengetahui dengan jelas dan tegas mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan.

c. Konsistensi

UEK-SP Kampung Melayu telah melakukan berbagai kegiatan mengenai penyuluhan umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi, namun masyarakat tidak sepenuhnya termotivasi untuk ikut dalam acara tersebut dengan berbagai alasan.

Tabel 1. Besaran Tunggakan UEK-SP Harapan Bersama Tahun 2016

No	Bulan	Nilai Tunggakan
1.	Januari	Rp. 165.000.000
2.	Februari	Rp. 162.000.000
3.	Maret	Rp. 150.000.000
4.	April	Rp. 175.000.000
5.	Mei	Rp. 175.000.000
6.	Juni	Rp. 120.000.000
7.	Juli	Rp. 135.000.000
8.	Agustus	Rp. 180.000.000
9.	September	Rp. 110.000.000
10.	Oktober	Rp. 110.000.000
11.	November	Rp. 110.000.000
12.	Desember	Rp. 110.000.000

Sumber Data : UEK-SP Harapan Bersama Kampung Melayu

Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan program membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan pelaksanaan program UEK-SP. Dukungan berupa moril dan materil akan menumbuhkan kreativitas dari para pelaksana itu sendiri, sehingga pelaksanaan program akan efektif. Dalam sumberdaya diperlukan beberapa hal diantaranya:

a. Staff

Banyaknya staff tidak otomatis mendorong Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi berjalan secara baik, hal mendasar yang perlu diketahui adalah kecakapan staff dalam bekerja yang perlu diperhatikan.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 2. Rekapitulasi Pemanfaat dan Pencairan Dana UEK-SP Harapan Bersama tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Pencairan
1.	2015	82	624.000.000
2.	2016	85	602.000.000
3.	2017	90	645.000.000
Jumlah			1.871.000.000

Sumber data: Laporan Keuangan UEK-SP Harapan Bersama

c. Informasi

Kelancaran informasi perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait dengan UEK-SP Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi. Pasalnya hal ini menjadi problem yang sulit diatasi oleh mereka, Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan sosialisasi sebagai salah satu wujud dari informasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan kepada seruh pihak yang berkepentingan.

d. Kewenangan

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Pembinaan melalui Program UEK-SP di Kampung Melayu, maka diharapkan kelompok ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu, baik dalam kemampuan, kete-

rampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di Kampung Melayu dan diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok.

e. Fasilitas

Fasilitas sangat penting sebagai salah satu upaya menghimpun, mengatur, memelihara, dan mengendalikan alat, benda, uang, waktu dan metode kerja serta peralatan apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam usaha kerjasama itu. Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam di Kelurahan Kampung Melayu terletak di Jalan Ketitiran No. 20 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yang masih memakai Fasilitas Kantor Pemerintahan Kelurahan. Berikut ini adalah tabel fasilitas yang dimiliki UEK-SP Harapan Bersama Kampung Melayu tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Fasilitas yang dimiliki UEK-SP Harapan Bersama Kampung Melayu tahun 2017

No	Jenis Inventaris	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	1 set	Kurang baik
2.	Meja	3 buah	Kurang baik
3.	Kursi	3 buah	Kurang baik
4.	Papan Informasi	1 buah	Baik
5.	Papan Plang nama	1 buah	Baik
6.	Lemari	1 buah	Baik
7.	Camera Digital	1 buah	Rusak

Sumber Data: UEK-SP Harapan Bersama tahun 2017

Faktor Disposisi

Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Pelaksanaan program membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam

(UEK-SP) di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi.

a. Pengangkatan Birokrasi

Pelatihan keterampilan yang dilakukan secara tidak rutin membuat kemampuan mereka dalam mengembangkan program ini kurang terampil dan memahami proses pengembangan hasil usaha mereka. Pelatihan/Bimtek/pendampingan Pelaku UEK-SP perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui kegiatan pelatihan/bimbingan teknis yang meliputi beberapa aspek penting misalnya aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan keuangan serta keterampilan teknis produksi dan pengendalian kualitas. Kegiatan monitoring dan evaluasi hendaknya dilakukan secara periodik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian program kegiatan bagi *stakeholders* yang terlibat.

b. Inisiatif

Inisiatif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi Selain itu dukungan positif yang dapat dilakukan adalah dimana antar kelompok UEK-SP di Kampung Melayu melakukan suatu kerjasama membangun inisiatif dalam menjalankan usaha yang diberikan. Pelaksanaan program ini berjalan secara maksimal dan masih terdapat banyak kekurangan diantaranya keterbatasan dan yang dianggap sebagai masalah. Dalam kemitraan ini, UEK-SP Harapan Bersama mencari inisiatif mitra sendiri dan kamipun hanya bisa memantau dari hasil laporan-laporan tersebut.

Faktor Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi-

kan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi.

a. *Standart Operation Procedur* (SOP)

Pentingnya sebuah keseriusan dari semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan Program ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak hanya menjalankan program secara sepihak. Dalam hal ini Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan ini. Seleksi pembentukan pra kelompok dan kelompok, pemilihan/pentuan jenis usaha, pelatihan keterampilan anggota UEK-SP, bantuan permodalan, dan evaluasi. Seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan membentuk UEK-SP dilakukan melalui mendatangi setiap rumah keluarga miskin yang terdata sebagai fakir miskin dan menanyakan secara langsung apakah mereka mau ikut kedalam Kelompok yang sedang dijalankan tersebut hal ini telah sesuai dengan SOP yang berlaku saat ini.

b. Struktur Birokrasi

Salah satu utusan yang mengikuti pelatihan akan menjelaskan apa-apa yang didapat pada saat pelatihan tersebut dan setelah itu akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UEK-SP tersebut. Selain itu menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

PEMBAHASAN

Dalam program pengentasan kemiskinan ini peran masyarakat juga penting dan yang terpenting dari itu ialah persepsi masyarakat dalam program ini. Tanggapan atau pendapat masyarakat tentang pemahaman program ini agar kelancaran suatu program dapat berjalan dengan baik, pengelola memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status keuangan, perkembangan dana me-

lalui rapat, semua itu disampaikan agar masyarakat dapat mengerti supaya masyarakat tidak salah persepsi.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*Target Group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Arus komunikasi yang terjadi harus tegas dan jelas. Bila tidak, maka akan terdapat kelonggaran bagi para pelaksana untuk menafsirkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, perlu dihindari adanya suatu hal yang dapat menimbulkan suatu kegaduhan, kebingungan diantara para pelaksana sebagai akibat dari adanya kelonggaran dalam menafsirkan kebijakan.

Para pembuat kebijakan (*Decision Maker*), dalam mengamatkan kebijakan kepada pelaksana tidak hanya sekedar melalui petunjuk atau perintah semata, akan tetapi *decision maker* harus melakukan komunikasi dengan para pelaksana kebijakan. Keterbukaan masyarakat seperti ini dapat tercapai antara lain dengan meningkatkan intensitas komunikasi. Masyarakat yang sering melakukan komunikasi dengan pihak lain mempunyai probabilitas yang tinggi untuk tidak bersikap *seristent to change*.

Salah satu faktor penentu keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu SDM-nya. Penanganan SDM harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka sistem pengelolaan SDM yang bersifat strategis, integrated, interrelated dan unity. Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Staf merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan, hal ini disebabkan karena staff sangatlah penting dalam suatu implementasi kebijakan. Akan tetapi jumlah staff

juga tidak semata-mata menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan karena informasi mempunyai dua bentuk, *pertama* informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana perlu mengetahui kebijakan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Dengan demikian para pelaksana diberi petunjuk untuk melakukannya. *Kedua* data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud: membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dll kewenangan untuk meminta kerjasama dengan Badan Pemerintah yang lain, dll. Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan, Ruang Kantor, Komputer.

a. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus

lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Inisiatif

Inisiatif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

Struktur Birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa ada kalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

SIMPULAN

Implementasi UEK-SP di Kelurahan Kampung Melayu belum sepenuhnya menyentuh masyarakat hal ini disebabkan oleh kurangnya pendekatan dengan masyarakat terhadap permasalahan membayar angsuran pinjaman masyarakat. Tingginya tunggakan Pinjaman oleh Masyarakat yakni disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar hutangnya sehingga terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman/penunggakan yang semakin banyak dan Belum optimalnya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UEK-SP di Kelurahan Kampung Melayu terdiri dari faktor komunikasi, dimana komunikasi belum berjalan secara maksimal, faktor sumber daya yang tersedia pada dasarnya ini memang tidak terbatas. Akan tetapi anggota yang benar-benar mengerti tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengolah Usaha tersebut yang masih belum ada. Pengelolaan anggaran yang masih kurang maksimal. Informasi yang terjadi adalah kurangnya koordinasi yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kelurahan Kampung Melayu menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Permasalahan kewenangan adalah perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang serasi antara berbagai pihak terutama Pemerintah Kelurahan maupun Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tetap konsisten dalam menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan masalah simpan pinjam. Selain itu fasilitas dimiliki saat ini sangatlah terbatas dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam faktor disposisi yang terjadi adalah tidak adanya dukungan dari masyarakat serta partisipasi dari kelembagaan lokal dan inisiatif dukungan yang diberikan belum berjalan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs Prentice Hall Inc.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2005. *Analisis kebijakan public*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Wahab. Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2004. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Wibawa, dkk dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Tahun 2003. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).